

Research Article

## Politik Identitas Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

Fathul Mu'in<sup>1</sup>, Suadi Sa'ad<sup>2</sup>, Sholahuddin Al Ayubi<sup>3</sup>, Iffan Ahmad Ghufro<sup>4</sup>

1. Mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, [222631004.fathul@uinbanten.ac.id](mailto:222631004.fathul@uinbanten.ac.id)
2. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, [suadi.saad@uinbanten.ac.id](mailto:suadi.saad@uinbanten.ac.id)
3. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, [sholahuddin.alayubi@uinbanten.ac.id](mailto:sholahuddin.alayubi@uinbanten.ac.id)
4. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, [iffan.agufro@uinbanten.ac.id](mailto:iffan.agufro@uinbanten.ac.id)

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : January 31, 2024  
Accepted : March 6, 2024

Revised : Februari 12, 2024  
Available online : March 31, 2024

**How to Cite:** Fathul Mu'in, Suadi Sa'ad, Sholahuddin Al Ayubi, and Iffan Ahmad Ghufro. 2024. "Politik Identitas Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10 (1):442-60. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v10i1.647](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.647).

**Abstract:** Identity Politics in the Study of Al-Qur'an Interpretation is the title of this article. The Qur'an and Hadith are considered the highest sources of Islamic law. So the researcher used the library research method, namely collecting data using various book literature that is related to this discussion. Unity and community are prioritized in Islamic identity politics. Islam, in contrast to Christian (and Western) thought, places less emphasis on individualism and individualism. Incitement to hatred against any action or discussion that could lead to slander is one of the organizing concepts found throughout Islamic history. The three-syllable phrase "politics, identity, and the Koran" is used to describe identity politics in the Koran. Politics refers to all matters and activities related to the government of a country. Politics can also be thought of as policy, or a way of acting to solve a problem. Knowing who you are and introducing yourself to the environment around you all starts from your identity, be it individual identity, family identity, institutional identity, or even citizen identity, starting from race, ethnicity, and so on. In fact, the Qur'an specifically talks about leaders, therefore it is clear that the Qur'an does not prohibit someone from using their identity to achieve goals. Must leaders be male or female, Muslim or not, and from a particular tribe or tradition? You are welcome to have an identity as long as it complies with the standards outlined in the verses of the Qur'an that have been explained previously, because there is no prohibition on having it in the Qur'an.

**Keywords:** Al-Qur'an, Thematic Interpretation, Politics, Identity.

**Abstrak:** Politik Identitas dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an menjadi judul tulisan ini. Al-Qur'an dan Hadits dianggap sebagai sumber tertinggi hukum Islam. Sehingga peneliti menggunakan metode library research, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Persatuan dan kemasyarakatan diutamakan dalam politik identitas Islam. Islam, berbeda

dengan pemikiran Kristen (dan Barat), kurang menekankan individualisme dan individualisme. Penghasutan kebencian terhadap tindakan atau diskusi apapun yang dapat mengarah pada fitnah adalah salah satu konsep pengorganisasian yang ditemukan sepanjang sejarah Islam. Frasa tiga suku kata "politik, identitas, dan al-Qur'an" digunakan untuk menggambarkan politik identitas dalam al-Qur'an. Politik mengacu pada semua hal dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah suatu negara. Politik juga dapat dianggap sebagai kebijakan, atau cara bertindak untuk menyelesaikan suatu masalah. Mengetahui siapa diri Anda dan memperkenalkan diri kepada lingkungan di sekitar Anda semua dimulai dari identitas Anda, baik itu identitas individu, identitas keluarga, identitas institusi, atau bahkan identitas warga negara, mulai dari ras, suku, dan sebagainya. Bahkan Al-Qur'an secara khusus berbicara tentang pemimpin, oleh karena itu jelas bahwa Al-Qur'an tidak melarang seseorang menggunakan identitasnya untuk mencapai tujuan. Apakah pemimpin harus laki-laki atau perempuan, Muslim atau bukan, dan dari suku atau tradisi tertentu? Anda dipersilakan memiliki identitas selama sesuai dengan standar yang telah digariskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan sebelumnya, karena tidak ada larangan untuk memilikinya di dalam Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** Al-Qur'an, Tafsir Tematik, Politik, Identitas.

## PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi manusia (*hudan li al-nas dan hudan li almuttaqin*).<sup>1</sup> Menurut Fazlur Rahman, "Peran Al-Quran harus mampu membangun ketertiban masyarakat dari yang awalnya hanya sekedar sebagai nasehat dan petunjuk dalam beribadah."<sup>2</sup> Al-wahyu Al-Qur'an mengatur, mengarahkan dan membimbing manusia dalam segala urusan agar sukses dunia dan akhirat. Jadi perdebatan Alquran tidak mengecualikan apapun, termasuk politik. Al-Quran sudah memberikan nilai-nilai dan etika bahkan sebelum suara ajakan itu terdengar.

Menarik membahas persaingan politik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal penting lainnya yang perlu ditekankan adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Sebab diperlukan alat yang kuat untuk menang dalam kontestasi politik. Ketika konflik politik terjadi, identitas ras, etnis, suku, dan agama juga memiliki ciri khas.

Padahal, Al-Qur'an telah memberikan rangkuman tentang variasi atau heterogenitas tersebut, dalam QS. Al-Hujurat : 13 yang artinya :

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengawasi". (QS. Al-Hujurat:13).*<sup>3</sup>

Dalam Lubabal-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, Jalaluddin al-Suyuthi mengatakan, konteks surat Al-Hujurat ayat 13 terjadi ketika Bilal bin Rabah menaiki Ka'bah untuk mengumandangkan azan menyusul Fathu Makkah. Dengan kejadian tersebut, Bilal bin Rabah diketahui sempat diolok-olok secara fisik oleh banyak temannya. Kemudian, sebagai reaksi atas praktik tersebut, ayat ini menyatakan bahwa Islam tidak mengklasifikasikan hamba berdasarkan ciri fisik, ras, suku, atau kedudukan. Islam

<sup>1</sup> Al-Quran Dan Terjemah Kementerian Agama QS. Al-Baqarah: 3 & 184

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, "Kata Pengantar" Dalam Islam, (Jakarta: Mizan: 2017), p. 57

<sup>3</sup> Al-Quran Dan Terjemah Kementerian Agama QS. Al-Hujurat : 13

berpendangan bahwa individu yang berakhlak lurus dan taat adalah orang yang mulia.<sup>4</sup>

Nasehat Nabi Muhammad SAW kepada Bani Bayadah agar menerima tawaran Abu Hindun pun menjadi asbabun nuzul ayat ini. Bani Bayadah mengabaikan petunjuk Nabi Muhammad SAW karena mereka mengetahui bahwa Abu Hindun adalah seorang budak. Ayat ini kemudian turun untuk menggarisbawahi bahwa dalam Islam, tuan dan budak diperlakukan sama.<sup>5</sup> Teks di atas dengan jelas menyatakan bahwa heterogenitas merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan lapang dada. Karena Allah SWT tidak ingin ada orang yang menganggap dirinya lebih unggul atau lebih rendah dari orang lain. Namun, alih-alih sifat individu, kesalehan dan moralitas yang digunakan sebagai tolak ukur.

Salah satu aspek dari keanekaragaman Indonesia adalah kekayaan budayanya, yang mencakup 17.000 pulau, banyak kelompok etnis, subkultur, dan bahasa daerah. Di Papua saja, terdapat lebih dari 252 suku, yang masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik. Semua itu dapat dilestarikan dan dipertahankan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Menurut Syafii Maarif, "Indonesia telah mempunyai modal dasar untuk menjamin keutuhan bangsa. Mulai dari pengalaman sejarah yang tercermin dalam Gerakan Nasional, Sumpah Pemuda, Pancasila, serta keinginan untuk menjaga dan melindungi keutuhan negara dan negara kita. Dalam konteks agama, kita punya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua sayap penting komunitas Muslim yang mendeklarasikan dan menjadikan diri mereka sebagai benteng demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Meskipun politisi yang bandel telah melemahkan jalur politik Indonesia pasca-proklamasi, negara ini telah bertahan selama lebih dari enam dekade, meskipun mengalami banyak keberuntungan dan bencana. Berbagai gerakan agama yang memisahkan diri menimbulkan risiko serius terhadap integritas bangsa."<sup>7</sup>

Syafii Maarif menjelaskan, politik identitas merupakan tantangan masa kini terhadap integritas nasional. Kecintaan terhadap agama tanpa ilmu atau kemauan untuk menyelidiki fakta seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan digunakan untuk menyenangkan masyarakat secara besar-besaran. Pesan-pesan provokatif di media sosial yang menekankan "identitas agama" seseorang mungkin akan membuat heboh masyarakat dan menjadi berita yang luar biasa.

Salah satu contoh yang bisa dijadikan acuan jika berbicara ancaman keutuhan bangsa berbasis politik identitas adalah ketika terdapat konten narasi keagamaan yang terdistorsi dalam politik tanah air. Apalagi narasi ini mengkristal ketika kasus QS. Al-Maidah: 51 yang dikeluarkan Gubernur nonaktif DKI saat itu, Basuki Tjahja Purnama. Terjemahan dan tafsir mulai bermunculan sesuai keinginan dan kebutuhan politik. Menurut Ahmad Najib Burhani, peristiwa yang menjadi penyebab lahirnya berbagai gerakan keagamaan yang mengedepankan identitas keagamaan ini merupakan peristiwa

---

<sup>4</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Luba bal-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, terjemah: Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2008), p. 102

<sup>5</sup> Asep SMR, *Pesan Al-Quran tentang Akhlak*. Dalam Jurnal: *Diya al-Afkar* (Vol. 5, No. 2, Desember 2017) p. 67

<sup>6</sup> Assyari Abdullah, *Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212*. Dalam Jurnal: *An-Nida* (Edisi: Desember 2017, Vol. 41 No. 2) p. 55

<sup>7</sup> A. Syafii Maarif, dkk, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme kita*. (Jakarta: Democracy Project. 2012) p. 19

kritis (peristiwa yang sangat penting) melihat perkembangan keagamaan di Indonesia yang terkait dengan fragmentasi otoritas agama. (fragmentasi atau fragmentasi otoritas agama).<sup>8</sup>

Berdasarkan pemikiran dan fakta yang telah dibahas di atas, penulis bermaksud untuk melakukan kajian lebih jauh mengenai Politik Identitas dalam perspektif Al-Quran. Sebab, peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa Al-Quran dijadikan sebagai objek suksepsi politik identitas yang terus berlanjut di Indonesia. Maka penting untuk melakukan penelitian mengenai perspektif Al-Quran terhadap politik identitas. Menjaga dan memelihara keutuhan dan keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara terminologi, politik identitas berasal dari dua kata, yaitu politik dan identitas. Pertama, mari kita definisikan politik. Politik berasal dari kata Yunani *politeia* atau *polis* yang berarti kota atau bangsa. Miriam Budiardjo mendefinisikan politik sebagai serangkaian tindakan dalam suatu sistem politik yang mencakup proses penetapan dan pencapaian tujuan sistem tersebut.<sup>9</sup> Identitas berasal dari kata identitas yang mengacu pada suatu kualitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok, seperti agama, suku, ras, dan faktor pembeda lainnya.

Jadi, yang dimaksud dengan politik identitas adalah identifikasi dijadikan sebagai instrumen politik suatu kelompok untuk tujuan tertentu, seperti perlawanan atau pengungkapan identitas kelompok yang sebenarnya.<sup>10</sup> Menurut Sri Astuti Buchari, "politik identitas merupakan senjata politik etnis untuk mencapai tujuan tertentu, yang pembentukannya sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dianggap sebagai tekanan oleh suatu kelompok etnis, seperti ketidakadilan politik yang mereka alami."<sup>11</sup>

Beberapa tokoh nasional mempunyai kekhawatiran yang serius terhadap maraknya politik identitas di Indonesia, seperti yang terekam dalam beberapa publikasi nasional. Alasannya, politik identitas mempunyai beberapa dampak negatif yang melemahkan prinsip persatuan dan membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia beragam dan dikenal damai.

Penulis menemukan bahwa literatur mengenai politik identitas masih kurang. Namun, karya-karya ini ditulis oleh individu-individu yang sangat berprestasi dalam profesi ini. Burhanuddin Muhtadi menerbitkan *Populisme Politik Identitas*, sedangkan Syafii Maarif berkontribusi pada *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Buku-buku lain tentang politik identitas mengeksplorasi identitas melalui kacamata politik suku atau etnis.

Karya dalam bentuk buku ilmiah belum cukup banyak, padahal penelitian mengenai politik identitas banyak dilakukan pada publikasi ilmiah. Hasilnya, penulis memberikan informasi bibliografi lebih lanjut dengan mengutip artikel yang relevan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Najib Burhani, Aksi Bela Islam: *Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan*. MAARIF (Vol. 14, No. 2, Desember 2016), p. 16

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), p. 8

<sup>10</sup> Mifdal Zusron Alfaqi, *Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas Serta Solidaritas*. Dalam *Jurnal: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Th. 28, No. 2, 2 Agustus 2015), p., 113

<sup>11</sup> Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), p., 20

Tulisan penulis unik karena menggambarkan politik identitas dengan menggunakan Alquran. Padahal Al-Quran (Agama) saat ini menjadi alat yang ampuh untuk mengubah gejolak masyarakat menjadi kesuksesan guna mencapai tujuan politik.

Berdasarkan buku-buku politik identitas yang pernah saya baca, termasuk karya Burhanuddin Muhtadi yang menulis *Populisme Politik Identitas*, dan Syafii Maarif yang menulis *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, artikel ini hanya menjelaskan bagaimana politik identitas itu berkembang di Indonesia, tetapi juga menjelaskan identitas dengan baik. Yang membedakan esai saya dengan literatur politik identitas lain yang pernah saya baca adalah perspektif Al-Qur'an tentang politik identitas. Apakah Al-Qur'an membolehkannya?

## METODE PENELITIAN

Penelitian, menurut penulis, hendak dilakukan dengan menggunakan metode *library research* artinya dengan mengumpulkan literatur yang relevan, melakukan penelitian kepustakaan, atau keduanya. Untuk memperjelas analisis penulis terhadap ayat-ayat yang terkait dengan politik identitas, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi literatur terkait, berita nasional tentang politik identitas, dan kajian tafsir buku yang terkait dengan yang diteliti.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Makna Politik

Istilah “politik” berasal dari istilah Yunani atau Latin “*politicos*” atau “*politicus*”, yang berarti “berkaitan dengan warga negara”. Kedua istilah tersebut berasal dari kata Yunani polis, yang berarti orang, kota, atau warga negara. Politik dalam bahasa Inggris mengacu pada sifat atau perilaku pribadi yang mencerminkan pengetahuan. Arti lain dari politik adalah strategi dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu keadaan. Ilmu politik merupakan disiplin ilmu yang menggunakan istilah ini.<sup>13</sup>

Definisi yang ada saat ini mengungkapkan dua kecenderungan dalam mendefinisikan politik. Pertama, pandangan yang menghubungkan politik dengan negara, yaitu pemerintah pusat atau daerah. Kedua, perspektif yang mengaitkannya dengan persoalan kekuasaan, otoritas, dan/atau konflik.

Lebih jauh lagi, politik melakukan berbagai proses yang dapat diklasifikasikan sebagai input atau output. Kategori pertama mencakup tindakan-tindakan yang mendasar untuk memahami cara kerja sistem politik dan diperlukan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan politik.

Dalam skenario ini, terlihat jelas bahwa inti politik adalah perilaku manusia dalam bentuk tindakan dan sikap yang dirancang untuk mempengaruhi atau menjaga ketertiban sosial melalui penggunaan kekuasaan. Politik adalah alat utama untuk memandu dan mengatur kerangka pemerintahan yang efektif.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, p., 225.

<sup>13</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), p., 34.

<sup>14</sup> A. Malik Haramain, *Gus Dur Militer dan Politik*. (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. Ke-1, p., 10

## 2. Konsep Politik dalam Islam

Filsafat politik pemerintahan Islam tampak jelas dalam kerangka strukturalnya. Konsep ini menetapkan kerangka berbagai kecenderungan manusia dan menyusunnya berdasarkan kebutuhan pelayanan yang diberikan. Menurut salah satu pandangan yang dikemukakan di atas, misi administrasi Islam adalah untuk memerangi semua jenis eksploitasi masyarakat, termasuk eksploitasi politik, ekonomi, dan intelektual.

Banyak individu cerdas sepanjang sejarah telah menyerah pada beban mereka sendiri dan terjatuh dalam jaringan eksploitasi. Para tiran akan mengincar para genius ini. Sebaliknya, pemerintahan Islam ingin menyediakan lingkungan bebas yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan orang-orang tersebut. Sejarah unik Islam menunjukkan fakta mendasar ini. Islam mengedepankan kebebasan dan martabat manusia berdasarkan kebutuhan setiap orang, tanpa memandang ras, keturunan, status, atau uang.<sup>15</sup>

Banyak individu dalam budaya pra-Islam adalah budak atau memiliki kehidupan serupa. Namun, mereka berpotensi menjadi pemimpin yang disegani di masa depan. Mereka dapat menunjukkan kegunaannya di berbagai bidang, termasuk politik, militer, dan akademisi. Pertumbuhan individu, potensi, dan politik Islam tidak boleh menimbulkan gesekan di antara individu-individu kreatif dalam berbagai profesi.<sup>16</sup>

Gagasan seperti ini tidak ada dalam administrasi Islam sebagai dokumen perjanjian dengan bahasa yang indah dan menggoda. Meskipun digarisbawahi oleh pengalaman sejarah Islam dan bahkan ditempatkan pada zaman kita sekarang, namun digunakan dan digunakan dalam kehidupan nyata. Berdasarkan bukti sejarah, Ali bin Abu Thalib, kepala pemerintahan Islam, hadir di hadapan hakim bersama warga biasa yang telah mengajukan tuntutan hukum yang menguntungkan. Dalam hal ini pengadilan memutuskan bahwa keputusan akan diambil antara penggugat dan pemohon.<sup>17</sup>

Pada masa pemerintahan Umar bin Khathab, seorang Yahudi yang terikat pada syariat Islam kembali memprotesnya. Ia didampingi oleh Ali bin Abu Thalib. Khalifah menyambut kerabat Nabi dan orang-orang Yahudi di istananya. Khalifah percaya bahwa dia telah menyatukan Ali ketika dia menyerukan keadilan bagi para leluhur dan mendengarkan mereka karena wajah Ali yang mulia dan kalah. "Aku tidak puas karena kamu tidak menanyakan hal yang sama kepadaku dan dia," kata Ali kepada Umar. Anda memanggil saya dengan nama panggilan saya dan ingin orang lain memberi saya lebih banyak rasa hormat, tetapi Anda tidak boleh memperlakukan saya dengan cara yang sama.<sup>18</sup>

## 3. Etika Islam dalam berpolitik

Al-Qur'an dan Hadits memuat ungkapan-ungkapan seperti ummat, sya'b, qabilah, dan lain-lain yang merujuk pada masyarakat atau komunitas. Namun kata negara tidak muncul dalam Al-Qur'an. Hal ini bisa dimaklumi mengingat Nicolo Machiavelli pertama kali memperkenalkan konsep negara atau negara-bangsa pada abad ke-16, yang masih ada hingga saat ini. Para sarjana sepanjang masa kuno dan abad

---

<sup>15</sup> Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004) p., 78

<sup>16</sup>Lihat: Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, p., 78

<sup>17</sup> Shubhi Mahmasani, *Falsafah Al- Tasyri' Fi- Islam*, (Beirut: Dar al- Ilm li - almalayin, 1988) p., 89-

91

<sup>18</sup> Sayyid Muhammad Baqir, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), p., 26

pertengahan tidak pernah memilikinya. Khalifah adalah kepala negara dan kepala agama, oleh karena itu keduanya bisa bersatu atau terpisah. Namun, para filsuf Muslim terus membahas hal ini hingga saat ini. Sekalipun kata "masyarakat Islam" sudah mapan maknanya, beberapa sektor tertentu masih mempertanyakan konsep atau tujuan "negara Islam". Islam adalah agama dengan sistem politik yang unik. Umat Islam harus kembali pada pemikiran Nabi dan Khulafa'ur Rasidin yang membentuk konstitusi Islam.

<sup>19</sup>

Al-Qur'an dan Hadits biasanya mendukung konsep negara Islam, meskipun konsep ini kontroversial dalam Islam karena mengandung ayat-ayat yang secara efektif menjelaskan bagaimana umat Islam memandang pemerintahan mereka. Nabi Muhammad lebih dari sekedar seorang nabi; dia juga pemimpin sekelompok orang yang mungkin dianggap negara. Lebih jauh lagi, beberapa ayat menyinggung peraturan Tuhan sebagai hal yang relevan bagi masyarakat dan negara, namun tidak satupun dari ayat tersebut membahas peraturan pemerintah. Negara atau pemerintah hanyalah instrumen penegakan hukum tersebut, sehingga menghasilkan negara yang tunduk pada aturan: *mà là yatim piatu alwajib illa bih fahuwa wājib. bermanfaat, oleh karena itu juga diperlukan*). Ungkapan "negara Islam" (daulah Islamiyyah), yang didefinisikan sebagai negara yang mempertahankan ide-ide Islam dan Syariah, pertama kali muncul pada pertengahan abad kedua puluh. Nama "dawah" berasal dari dua frasa yang digunakan oleh Kekhalifahan Mu'awiyah dan Abbasiyah: "Umawiyah dawlah" dan "Abbasiyyah dawlah", yang pada saat itu berarti "pembaruan dinasti".<sup>20</sup>

Penerapan etika dan moral politik merupakan persoalan krusial karena terkait dengan risalah utama Nabi. "Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik," demikian bunyi hadis tersebut. Al-akhlaq al-karimah, atau "akhlak mulia", mengacu pada praktik berbuat baik (mahmudah) dan menghindari keburukan (madzmumah). Kepercayaan, keadilan, persaudaraan, pengertian, kolaborasi, diskusi, perdamaian, dan kendali penuh (amr maruf nahy munkar) menjadi prinsip panduan dalam menganut etika ini.

Landasan etika moral diperlukan karena hal ini mencegah aturan-aturan formalistik menjadi satu-satunya hal yang memungkinkan orang mendiskusikan moralitas atau menggunakan wilayah abu-abu, seperti yang kadang-kadang dilakukan oleh mereka yang mengabaikan moralitas. Tanpa landasan moral dan etika, suatu komunitas atau negara akan mengalami kemerosotan atau mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Secara lebih konkrit, ketiadaan moralitas ini menyebabkan munculnya otoritas/keputusan, pelarangan segala cara untuk memperoleh kekayaan atau kekuasaan, penindasan atau tirani terhadap pihak yang lebih lemah, munculnya egoisme, groupisme, dan konflik, serta tidak adanya hukum. penegakan hukum diperlukan untuk membantu, dan sebagainya. Etika politik sangat penting bagi umat Islam untuk berkembang menjadi masyarakat beradab karena etika berfungsi sebagai landasan wacana, tindakan, cita-cita, dan standar dalam politik nasional.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Andi Rahman, *Modus Sukses Kepemimpinan dalam Politik Islam: Sebuah Pendekatan Sejarah*, Dalam Jurnal Mumtaz, (Jakarta: Institut PTIQ, 2012), Vol. 02, No. 2 p., 75

<sup>20</sup> Mahmud Shaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966) Cet. III, p., 37

<sup>21</sup> Seyyed Hossein, *Islam Tradisi*, (Bandung: Pustaka, 1994), Cet. I, p., 123-126

#### 4. Politik Identitas

Mengingat perubahan yang terjadi, politik identitas menjadi ukuran keberhasilan yang lebih umum. Identitas merupakan cerminan diri sendiri karena dibentuk oleh keluarga, jenis kelamin, budaya, ras, dan sosialisasi. Identitas pada dasarnya merupakan cerminan siapa diri kita dan bagaimana orang lain memandang kita. Di sisi lain, identitas dipandang sebagai sarana untuk mendefinisikan diri sebagai individu yang berbeda dengan berbagai tindakan, keyakinan, dan sikap. Kajian sosiologi modern tidak lagi menganggap politik identitas sebagai sesuatu yang statis, konstan, atau tidak berubah.

Identitas dipandang sebagai konstruksi sosial yang terus berkembang, terkadang sangat cepat, oleh masyarakat. Gagasan ini berpendapat bahwa identitas akan selalu mencakup pergerakan dan perubahan baik dalam ruang maupun waktu. Salah satu komponen stratifikasi sosial dalam sosiologi adalah etnisitas yang dibedakan atas ras, kelas, dan strata sosial.<sup>22</sup>

Kajian tentang identitas dan etnis merupakan topik penelitian yang berkaitan erat. Donald L. Morowitz (1998), seorang analis politik di Duke University, menggambarkan politik identitas sebagai tindakan membangun perbedaan yang jelas antara siapa yang diterima dan siapa yang dikecualikan. Status sebagai non-anggota pada awalnya tampak permanen karena garis penentuannya seolah tidak berubah.<sup>23</sup>

Berdasarkan perkembangan terkini di Indonesia, politik identitas terutama dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap ras, agama, ideologi, dan kepentingan pemain lokal, yang tercermin dalam pertumbuhan regional. Menelaah berbagai temuan studi menunjukkan bahwa desentralisasi merupakan faktor penentu munculnya politik identitas. Etnisitas menjadi perhatian akibat aktivitas politik pada masa desentralisasi yang mengandalkan kelas, agama, dan etnis untuk membangun legitimasi politik dan mencapai tujuan.<sup>24</sup>

Al-Qur'an dan Hadits dianggap sebagai sumber hukum Islam yang paling otoritatif. Negara Islam Indonesia sangat yakin bahwa negara harus membuat undang-undang berdasarkan hukum Islam dan sangat menentang semua ideologi lain, menyebutnya sebagai "hukum kafir" selain Alquran dan Hadits.<sup>25</sup>

Mengingat suasana politik saat ini di Indonesia, penting untuk mengevaluasi relevansi politik ayat ini dalam kaitannya dengan keprihatinan politik umat Islam, termasuk moralitas, reformasi struktural, dan efektivitas. Sistem politik. Upaya-upaya untuk meningkatkan citra diri sebagai sesama manusia harus dilakukan untuk mencegah maraknya politik identitas Islam. Untuk bersatu, umat Islam harus memilih dan bahkan memilih orang-orang yang memiliki agama dan pandangan yang sama. Upaya ini sangat penting untuk dilakukan. Hal ini merupakan upaya membangun kebersamaan dan rasa memiliki sebagai sesama umat Islam dengan memadukan ayat-ayat Alquran dengan fatwa ulama, yang digunakan untuk menggalang dukungan

---

<sup>22</sup> Yosafat Hermawan Trinugraha, *Membaca Politik Identitas Anak Muda Minoritas*, Dalam Jurnal: Setudi Pemuda (Vol. 2, No. 2, September 2013) p., 3

<sup>23</sup> Muhtar Habbodin, *Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal*, Dalam Jurnal: Jurnal Studi Pemerintahan (Vol.3 No.1 Februari 2012) p., 120

<sup>24</sup> Wantona Saradi. *Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal*, Dalam Jurnal: Jurnal Sosiologi Pedesaan (Vol. 6, No. 1, April 2018), p., 2

<sup>25</sup> Endang Sari, *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, Dalam Jurnal: Kritik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Vo 2 No.1 Juni 2016) p., 3

pemilih terhadap para pemimpin umat Islam.<sup>26</sup>

Sejauh ini telah terjadi kebingungan mental. Politik identitas umat Islam terlalu luas, seperti terlihat pada dakwah dan gerakan sosial lainnya seperti amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan akhlul karimah. Tentu saja, setiap orang berhak atas segalanya, namun "kekuatan moral" agamalah yang menyebabkan hal itu muncul. Penting untuk menggambarkan tujuan secara eksplisit. Aktivitas politik harus jelas dan nyata agar masyarakat paham apa yang harus dilakukan dan ke mana arahnya. Politik identitas adalah tindakan pemaksaan, bukan pembenaran atas pemaksaan moral. Kebijakan publik diperlukan untuk politik identitas, bukan kesalahan pribadi.<sup>27</sup>

Umat Islam selalu bungkam, dan akibatnya, mereka dipinggirkan, seolah-olah mereka hanya dibutuhkan ketika situasi sedang genting. Tidak disangka, umat Islam memiliki "psikologi krisis" dan unggul dalam keadaan darurat namun kesulitan dalam kondisi normal. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa posisi umat Islam telah bergeser dari yang berada di luar atau tertinggal menjadi berada di tengah. Islam harus menjaga kendali atas sistem politik agar dapat berjalan dengan baik.<sup>28</sup>

### 5. Hakikat Politik Identitas dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, identitas politik diwakili oleh tiga istilah yang masing-masing memiliki tiga suku kata. Untuk memahami kalimat tersebut, definisi setiap kata harus dijelaskan terlebih dahulu.

Kamus bahasa Arab biasanya menerjemahkan kata "politik" menjadi "siyasah". Selain itu, kata kerja ini dapat diartikan sebagai "menggerakkan", "mengendalikan", "mengelola", dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik mencakup segala persoalan dan kegiatan (kebijakan, strategi, dan sebagainya) yang berkaitan dengan pemerintahan nasional dan luar negeri. bangsa. Politik juga dapat dipahami sebagai cara mengambil tindakan dan merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan.<sup>29</sup>

Yang kedua adalah "identitas", yaitu kunci untuk mengenal diri sendiri atau mengenalkan diri pada lingkungan saat ini, mulai dari identitas pribadi, identitas keluarga, identitas institusi, bahkan identitas warga negara, mulai dari ras, suku, dan sebagainya; terkadang bahkan pemimpin pun harus memiliki identitas yang berbeda. Identitas pada dasarnya adalah cerminan diri kita sendiri dan juga cara orang lain memandang kita. Identitas juga mendefinisikan seseorang sebagai individu dengan perilaku, keyakinan, dan sikap yang berbeda. Menurut para ahli, identitas merupakan cermin diri atau refleksi diri yang dipengaruhi oleh keluarga, gender, budaya, etnis, dan sosialisasi.<sup>30</sup>

Yang ketiga adalah "Al-Qur'an" yang secara etimologis berarti membaca; dalam QS Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya:

*"Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur'an (didalam dadamu) dan (menetapkan)*

---

<sup>26</sup>Endang Sari, *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, Dalam Jurnal: Kritik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, p., 3-11

<sup>27</sup> Muhammad Al-Burai, *Paradikma Politik Identitas Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), p., 46

<sup>28</sup> Stephen Sulaiman Schwart, *Dua Wajah Islam, Moderatisme VS Fundamentalisme Dalam Wacana Global*, (t,tp, Blantika, 2007), Cet.1, p., 191

<sup>29</sup>Lihat Abdul Muin Salim, *Fiqih Siyasah, Konsepsi kekuasaan dalam Al-Qur'an*, p., 34

<sup>30</sup> Yosafat Hermawan Trinugraha, *Membaca Politik Identitas Anak Muda Minoritas*, Dalam Jurnal: Setudi Pemuda (Vol. 2, No. 2, September 2013), p., 3-5

*bacaanya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan kami, (karena itu), jika kami telah membacanya, hendaknya kamu ikuti bacaanya. (Q.S Al-Qiyamah ayat 17-18).*<sup>31</sup>

Ungkapan "Al-Qur'an" mengacu pada firman Allah, yaitu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan secara mutawatir, dan barangsiapa yang membacanya maka ia akan beribadah. Menurut definisi di atas, Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT, bukan ucapan manusia, jin, setan, atau malaikat. Ia tidak berasal dari pemikiran makhluk, juga tidak berasal dari puisi atau penalaran filosofis manusia. Kami menerima Al-Qur'an dengan mutawatir. Al-Qur'an senantiasa dipelihara dan dijaga keabsahannya secara turun-temurun hingga akhir zaman, menyiratkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak mungkin semua orang sepakat untuk menyetujuinya. berbohong. Membaca Al-Qur'an dianggap ibadah, berbeda dengan membaca literatur nabi-nabi terdahulu atau hadis Nabi Muhammad SAW.

Adakah pernyataan dalam Alquran yang merujuk pada politik identitas dalam ranah politik? Beberapa tema yang menyiratkan politik identitas dalam politik dapat ditemukan dalam kajian-kajian, namun ungkapan politik identitas tidak seluruhnya diterjemahkan dalam Al-Quran. Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang politik identitas dalam arena politik, namun petunjuk tersebut tidak jelas dan tidak sistematis jika diberikan dalam kajian yang mencakup semua hal, seperti yang dipahami sekarang. Kelompok ini juga dikaitkan dengan dorongan besar terhadap politik identitas dalam Al-Qur'an.

Dalam QS. Ar-Rum : 22 Allah SWT Berfirman yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran-)Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa-bahasa dan warna (kulit) kamu. Sungguh, dalam yang demikian itu ada bukti-bukti bagi orang yang mengetahui". (Q.S.Ar-Rum: 22).*<sup>32</sup>

Ayat ini memberikan lebih banyak bukti keagungan dan kekuatan Tuhan, seperti proses penciptaan dunia dan langit yang sangat besar, teliti, dan menyeluruh. Sebenarnya, ada beberapa galaksi di luar angkasa, masing-masing galaksi memiliki sistem peredaran darah yang sangat teratur. Planet-planet di masing-masing galaksi ini tidak pernah bertabrakan satu sama lain atau dengan dirinya sendiri, oleh karena itu planet-planet tersebut tidak pernah hancur. Ada peraturan yang ditetapkan yang dipatuhi setiap saat.

Ayat di atas menyoroti keberagaman bahasa dan warna kulit sebelum menekankan keagungan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Allah menjelaskan bahwa pada hakikatnya Dia membagi umat manusia ke dalam banyak bagian yang Dia anggap setara. Allah berkomunikasi dengan umat manusia baik secara lisan maupun melalui mulut.<sup>33</sup>

## 6. Pandangan Al-Qur'an tentang Politik Identitas

Ada beberapa kata dalam Al-Qur'an yang mencerminkan politik identitas. Untuk mempelajari lebih jauh konsep-konsep tersebut, mari kita simak peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, seperti apakah seorang pemimpin harus laki-laki atau perempuan,

<sup>31</sup> Al-Quran dan Terjemah Kementerian Agama Qs. Al-Qiyamah: 17-18

<sup>32</sup>AL-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama Qs. Ar-Rum: 22

<sup>33</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), p., 1147-1149

Muslim atau non-Muslim, dari berbagai suku atau ras, dan sebagainya; kita akan membahas masing-masing satu per satu di bawah ini.

#### a. Hubungan dan Identitas Pemimpin dalam Al-Qur'an

Identitas intrinsik seorang pemimpin bisa juga melambangkan institusi seperti suku, agama, dan kebangsaan, seperti yang terlihat pada peristiwa Pilkada DKI Jakarta kemarin dan Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. Menunjukkan bahwa identitas seorang pemimpin mempengaruhi bagaimana seseorang membuat pilihannya sendiri dalam memilih seorang pemimpin, maka sangat penting bagi Al-Qur'an untuk mengambil alih harmonisasi hal ini. Diantaranya adalah:

##### 1) Imam (Pemimpin)

Al-imam dibahas pada ayat 124 Q.S. Al-Baqarah, yang artinya:

*“Dan Ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhanya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman: Janji-Ku ini tidak mengenai orang yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 124.*

Ayat di atas jelas memuat istilah imam yang menunjuk pada pemimpin, khususnya doa Nabi Ibrahim, dan ditegaskan bahwa banyak keturunannya yang menjadi pemimpin, pada ayat lain yang berbicara tentang pemimpin Q.S. Al-Ambiya' [21] ayat 73 yang artinya:

*“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang member petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembayang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”. (Q.S. Al-Ambiya' [21] 73)*

Ayat ini membahas tentang derajat optimal pemimpin yang akan mengabdikan kepada masyarakat, seperti para nabi, dan bagaimana umat manusia memilih Allah SWT. Karena ayat-ayat tersebut sangat berkorelasi, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks para nabi menjadi contoh yang luar biasa dalam mengarahkan umat manusia ke arah yang bermanfaat bagi umat manusia.

Menurut Ibnu Katsir, ciri utama yang disebutkan di awal dua ayat yang berbicara tentang kepemimpinan ideal adalah pemimpin selalu mengajak rakyatnya ke jalan Allah kemudian bergabung dengan mereka sebagai anggota teladan dengan terlebih dahulu mencontohkan ketaqwaan dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi shalat. dan menunaikan zakat, sehingga menjadi golongan 'abid' (hamba) yang senantiasa tunduk dan taat mengabdikan kepada Allah SWT dengan mewujudkan ajaran-Nya yang meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>34</sup>

Imam yang dimaksud adalah imam agama, bukan raja atau dinasti yang mungkin diwariskan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, keturunan Abraham tidak boleh berbangga diri sebagai keturunan Imam Besar. Sedangkan jika mereka berlaku tidak adil, maka bukan kemuliaan karena mereka adalah keturunan Ibrahim, melainkan beberapa dosa, jika merekalah yang pertama kali melanggar amanat para pendahulunya.

<sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, (Kairo: Dar Al-Manar, 1999), p., 368

Oleh karena itu, Tuhan memberinya peran sebagai pendeta, dan itu adalah hal yang wajar. Imamah sejati tidak diraih begitu saja oleh semua orang. Kekayaan dapat diwariskan kepada keturunannya. Gelar raja boleh diturunkan, namun Imamah autentik harus lulus ujian.<sup>35</sup>

## 2) Persyaratan Kepemimpinan Alquran

Dalam Islam, memiliki pemimpin dalam suatu komunitas adalah suatu keharusan. Berdasarkan beberapa nash Al-Quran tentang kepemimpinan, para ulama menetapkan bahwa menjadi pemimpin tidaklah mudah. Kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab yang sulit dengan tugas tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat; Jadi, meskipun terdapat perbedaan pendapat, para ulama sepakat untuk menetapkan persyaratan unik bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin.

Misalnya Imam al-Mawardi mengartikan tujuh sifat pemimpin muslim, yaitu: (1) Adil, (2) Berilmu setingkat mujtahid, (3) Sehat jasmani, (4) Cerdas, (5) mempunyai kapasitas memimpin, dan (6) Berani berkorban demi menjaga kehormatan dan berjihad dengan musuh.<sup>36</sup>

### b. Hubungan antara pemimpin Muslim dan non-Muslim.

Dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan, hampir semua aliran pemikiran sepakat bahwa memiliki seorang pemimpin itu perlu. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa seorang pemimpin; bahkan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa "penguasa yang tidak adil lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali".<sup>37</sup> Ada juga kepercayaan bahwa enam puluh tahun bersama pemimpin yang buruk lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin.

Tentu saja, Al-Qur'an harus menjawab pertanyaan apakah pemimpin haruslah seorang Muslim atau non-Muslim. Jika melihat definisi syarat menjadi pemimpin di atas, seharusnya ada penjelasan lebih detail mengenai posisi Al-Qur'an dalam masalah ini. Pemimpin pada masa Nabi benar-benar menentukan Islam sebagai pemimpin (Q.S. At-Taubah: 65) yang artinya:

*"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?'" (at-Taubah: 65)*

Isi Surat ini berhubungan dengan orang-orang Yahudi yang munafik. Mereka tidak puas dengan kemajuan Islam di Madinah. Islam secara bertahap menjadi lebih kuat. Seiring bertambahnya populasi Muslim, status sosial mereka juga meningkat. Kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah mengganggu kehidupan mereka yang sebelumnya damai. Mereka hidup dan berkembang dengan terus-menerus mempertentangkan suku Aus dan Khazraj, dua suku penting di Madinah, yang mengakibatkan keduanya terlibat dalam konflik "Bu'ats". Pertarungan berlarut-larut yang berlangsung selama beberapa dekade.

Dalam hal ini, orang-orang Yahudi menikmati peran mereka sebagai penguasa ekonomi di Madinah. Namun begitu Nabi Muhammad SAW datang di kota tersebut dan

<sup>35</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), Jilid.1, hal. 194-195

<sup>36</sup> Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Bairut: Dar Shadir, t.th), p., 95

<sup>37</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Ishlahi Ar-Ra'I Wa-Arra'iyah*, (Kairo: Maktabah Ar-Risalah, t.th.), p., 79.

mampu mendamaikan kedua suku tersebut, maka kaum Yahudi mulai melemah, semakin terhimpit dan kehilangan kedudukannya di hati masyarakat Madinah. Melihat hal tersebut, banyak di antara mereka yang memilih memihak, mengaku beragama Islam namun memendam rasa ragu dan benci terhadap Nabi dan para sahabat. Ucapan mereka sangat merugikan umat Islam, seperti "Sammin kalbak, ya'kulka" (gemukkan anjingmu, maka anjingmu akan melahapmu). Ungkapan "sindiran yang sangat menyayat hati" ditujukan kepada Nabi dan para sahabatnya, yang tiba di Madinah dalam keadaan sulit, namun setelah lama tinggal di sana, umat Islam semakin berkuasa dan semakin terpuruk dalam kehidupan sosial.

Jika kita mengambil kesimpulan dari kisah perjalanan pemimpin pada masa Nabi, kita mungkin menyimpulkan bahwa pemimpin tersebut haruslah seorang Muslim, dan bahkan haram bagi umat Islam untuk mengikuti pemimpin non-Muslim. Dalam (QS Al-Imran : 28) yang artinya:

*"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. (Q.S. Al-Imron, 28).<sup>38</sup>*

Namun jika diterapkan di Indonesia, berbeda jauh dengan masa Nabi, karena negara Indonesia sangat menghargai keberagaman dalam berbagai hal, baik agama, ras, dan adat istiadat. Negara dan aspek-aspek bangsa lainnya harus dikaji secara cermat. Negara harus terlibat dalam pengumpulan penodaan agama dan simbol-simbolnya dengan menggunakan taktik preventif dan persuasi untuk mendamaikan kelompok yang berseberangan. Jangan biarkan hal itu menyebar; sebaliknya, sebarkan lebih banyak lagi.

Tentu saja, kami menghormati beberapa negara di dunia yang tidak beragama Islam, namun sistem yang ada menjamin perdamaian, keamanan, dan ketenangan penduduknya. Mereka saling menghormati dan memahami perasaan individu dari berbagai agama. Jadi ini adalah negara yang aman dan damai, dengan masyarakat yang ramah, meskipun berbeda pandangan, namun menikmati kehidupan yang kaya. Kita sebagai umat Islam harus bisa mengembangkan hal seperti itu, dengan semboyan "wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'ali itsmi wal udwan", yang artinya saling membantu secara merata dalam tolong menolong dan bertakwa serta memanfaatkan sumber daya yang ada. sama untuk dosa dan ketidakadilan.

Berdasarkan wilayah pemerintahan atau negara masing-masing, tidak perlu pemimpinnya seorang Muslim atau non-Muslim, karena pemerintahan masing-masing negara berbeda; Namun, pada masa Nabi, pemimpin haruslah seorang Muslim, dan pemimpin non-Muslim dianggap haram. Namun pemimpin Indonesia harus beragama Islam, hal ini tidak mungkin dilakukan karena Indonesia adalah negara demokrasi dan bukan negara Islam. Menurut pendapat para ahli di atas, Indonesia lebih mengikuti Imam al-Mawardi dan Ibnu Khaldun dibandingkan Abdul Qadir Audah.

### **c. Realisasi Pemimpin Perempuan**

Sayyid Quthub terkenal dengan pernyataannya, "Perempuan adalah pilar peradaban bangsa," ketika membahas peran perempuan modern. Banyak gerakan yang terhenti karena kita mengabaikan potensi dan eksistensi perempuan. Jadi, sembari membahas keberadaan dan potensi peran perempuan, pada dasarnya kita juga

---

<sup>38</sup> Al-Quran dan Terjemah Kementerian Agama (Q.S. Al-Imron, 28)

membahas pertanyaan tentang peradaban masa depan suatu bangsa, dan apa artinya kemajuan dan modernisasi suatu masyarakat jika perempuan tidak diikutsertakan.<sup>39</sup>

Misalnya, pada masa Orde Baru, perempuan lebih dari sekedar instrumen politik untuk mempertahankan status quo; mereka adalah mitra kerja yang saling menguntungkan. Pemerintah membentuk sejumlah kelompok perempuan pada periode tersebut, yang menempatkan perempuan pada posisi rumah tangga. Hal inilah yang menyebabkan perempuan Indonesia kini menghadapi berbagai tekanan psikologis dan fisik. Sementara itu, laki-laki memegang posisi berpengaruh dalam berbagai bidang pengambilan keputusan dan kebijakan publik.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia saat ini, penting untuk menciptakan kembali pemikiran dan gerakan perempuan, serta memanfaatkannya sebagai bahasa perempuan dalam kerangka kehidupan berbangsa, khususnya perjuangan politik.

Al-Quran membahas tentang munculnya pemimpin perempuan. Apakah Alquran mengizinkan atau melarang pemimpin perempuan? (Q.S. An-Nisa, :34) yang artinya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa,:34)*

Tidak ada perbedaan yang jelas dalam ayat ini antara imam laki-laki dan perempuan. Hanya ada satu penegasan: laki-laki adalah pembela, pemimpin, dan pelindung perempuan. Karena imam salat adalah pemimpin jamaahnya, dan yang ditunjuk oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin adalah laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi imam salat berjamaah jika jamaahnya laki-laki.

Bukankah topik ayat ini ada kaitannya dengan persoalan rumah tangga yaitu urusan suami istri, karena disebutkan nafaqah? Jika ayat ini diperluas secara keseluruhan, maka keseluruhannya akan membahas masalah keluarga atau hubungan suami-istri. Mengapa hal ini harus dibahas dalam konteks salat berjamaah, bahkan untuk masalah kepemimpinan secara umum?

Dari segi makna, dalil ayat tersebut lebih banyak pada kesulitan rumah tangga. Namun, penting untuk membahas masalah keluarga yang tidak seserius shalat berjamaah, serta masalah kemasyarakatan dan bahkan negara. Perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dalam urusan kecil seperti keluarga, sehingga mereka juga tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dalam urusan yang lebih besar seperti masyarakat dan negara..<sup>41</sup>

Ini tentang sahabat Nabi, Ummu Waraqah. Ada hadis yang membolehkan

---

<sup>39</sup> Khaeron Sirin, Rekonstruksi Pemikiran Dan Gerakan Perempuan, Dalam Jurnal: Pembangunan Masyarakat Qur'ani, (Jakarta: Radians Presisi Media, 2007), p., 92.

<sup>40</sup> Muntah Azri, Masa Depan Kaum Wanita, (Surabaya: Alfikr, 2008), Cet.ke-3, p., 45

<sup>41</sup> Ali Musthofa Yaqub, *Imam Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), Cet.1, p., 20-22

perempuan memimpin salat berjamaah. Dia adalah wanita sahabat Nabi Saw yang berasal dari marga Ansar (penduduk lokal Madinah). Ada narasi yang melatar belakangi mengapa Nabi SAW mengijinkannya melaksanakan salat berjamaah.

Menurut Ibnu Katsir, laki-laki harus memperhatikan perempuan. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, menjadi hakim bagi perempuan dan laki-laki, serta memberikan koreksi ketika mereka menyimpang dari kebenaran. Ayat lain menyatakan, "Allah melebihkan sebagian mereka dari pada sebagian lainnya," menyiratkan bahwa Allah lebih menekankan laki-laki daripada perempuan. Hal ini karena laki-laki lebih unggul dan lebih baik dari perempuan.<sup>42</sup>

Menurut Tafsir Al-Munir, laki-laki mempunyai pengaruh terhadap perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibandingkan perempuan, seperti akal yang sangat baik, pengasuhan yang baik, pandangan yang kuat, dan kekuatan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan amal shaleh dan ketaatan. Oleh karena itu, laki-laki diberi kewenangan khusus untuk menjalankan kenabian, imamah, pemerintahan, atau mewakili agama, bersaksi di pengadilan, melaksanakan jihad, shalat Jumat, dan sebagainya, serta membelanjakan harta, mahar, dan sebagainya. dan biaya.<sup>43</sup>

Tidak ada amanat eksplisit dalam ayat ini yang mengatakan, "Wahai laki-laki, jadilah pemimpin," atau "Wahai perempuan, terimalah kepemimpinan." Realitas adalah konsep pertama yang dijelaskan. Tidak ada perintah, namun laki-laki memimpin perempuan. Misalnya, jika ada perintah yang mengharuskan perempuan memimpin laki-laki, maka perintah tersebut akan gagal karena tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki tidak hanya memimpin perempuan pada manusia, tetapi juga pada hewan.<sup>44</sup>

Berdasarkan berbagai bacaan di atas, surat al-Nisa ayat 34 tidak memuat pernyataan yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Yang ada hanyalah kabar bahwa Allah SWT adalah pemimpin para wanita dan istri. Jadi, dalam teks ini, perempuan tidak dilarang menjadi pemimpin masyarakat.

Jika kita mengambil kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu pemimpin harus laki-laki, dan yang lebih penting lagi yang menjadi pemimpin harus laki-laki, tidak ada syarat pemimpin harus laki-laki. Jika ada pemimpin perempuan, bukan berarti laki-laki lemah; namun yang penting adalah mempertimbangkan konteks kondisi dan situasi di suatu wilayah atau kelompok lain.

#### **d. Pembentukan pemimpin Agama, Suku, Ras, dan Antar Golongan**

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, jelas ada kebutuhan untuk mengkaji politik identitas, karena segala cara untuk mencapai tujuan identitas menjadi alat untuk mencapai tujuan. Agama misalnya dijadikan senjata, dan suku, suku, dan ras juga dijadikan alat atau alat untuk mencapai tujuan, dengan tidak terlalu memperhatikan kiri dan kanan yang mungkin akan mengganggu, namun apapun upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. digunakan.

Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan merendahkan satu agama, ras, atau kebangsaan sambil memuji agama lain. Untuk membangun negara "Rahmatan Lil Alamin", Islam atau pemerintah harus mengambil

<sup>42</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, hal. 292

<sup>43</sup> Al-Allamah Asy-Syaih Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten), *Tafsir AlMunir Marah Labid*, jilid, hal. 558-559

<sup>44</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Terjm), Jilid.2, hal. 1195-1196.

tindakan yang menekankan penolakan terhadap rasisme, fanatisme etnis, dan diskriminasi keji. Hal-hal mendasar inilah yang harus diperjuangkan dan dilestarikan, apapun keputusan politik aktual yang diambil di Indonesia saat ini. Jangan menggunakan strategi yang mengadu domba lawan demi mencapai tujuan, seperti berkelahi atau menjelek-jelekan satu sama lain. Karena hal tersebut akan membahayakan keutuhan dan persatuan bangsa, serta merusak nama baik prinsip-prinsip indah ajaran Islam di negara kita.<sup>45</sup>

Dalam hal ini, Al-Qur'an tentu akan berperan dalam meluruskan persoalan-persoalan yang terjadi dalam politik identitas. Secara eksplisit menyebutkan keberagaman suku manusia dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an juga menyebutkan perbedaan bangsa dan suku yang menunjukkan pengakuan terbuka Islam terhadap keberagaman suku dan budaya manusia. Allah SWT telah menekankan keagungan dan keutamaan manusia pada umumnya, tanpa membedakan suku, bahasa, budaya dan agama. (Q.S. Al-Isro', ayat 70) yang artinya:

*"Sungguh, telah Kami muliakan bani Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan Kamiutamakan mereka melebihi sebagian besar makhluk yang Kami ciptakan. (Q.S. Al-Isra': 70).*

Allah SWT mengungkapkan kekagumannya terhadap Bani Adam dan keagungan yang dianugerahkan-Nya kepada mereka, dengan menyatakan bahwa Allah telah menjadikan mereka dalam wujud yang paling besar dan paling sempurna di antara semua makhluk. Dengan wujud atau penampilan yang baik, tinggi sedang, dan kemampuan mengendalikan segala sesuatu di bumi untuk kesenangannya, ia dapat bersifat industri, berpengetahuan, berbicara, dan memakan makanan lezat yang berasal dari hewan, seperti daging, samin, dan susu, atau dari tanaman seperti buah dan biji.<sup>46</sup>

Al-Qur'an juga menyinggung keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan peradaban yang kesemuanya merupakan ketetapan Tuhan yang tercatat dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diabaikan demi tujuan tertentu. (Q.S. Ar-Rum, Ayat 22) yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran-)Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa-bahasa dan warna (kulit) kamu. Sungguh, dalam yang demikian itu ada bukti-bukti bagi orang yang mengetahui. (Q.S. Ar-Rum: 22).*

Ayat ini membahas berbagai wujud kekuasaan dan keagungan Tuhan, seperti penciptaan langit dan bumi sebagai suatu kejadian yang luar biasa, sangat akurat, dan tepat. Sebenarnya, ada banyak sekali galaksi di alam semesta luas, dan setiap galaksi mempunyai sistem sirkulasi yang paling teratur; mereka tidak pernah bertabrakan satu sama lain atau dengan planet-planet di galaksi mereka. Semuanya berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.

Ayat di atas menyebutkan keagungan Allah melalui penciptaan langit dan bumi, diikuti dengan keberagaman bahasa dan warna kulit. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa Dia telah secara sah menciptakan umat manusia terdiri dari beberapa ras yang semuanya mempunyai kedudukan yang sama di mata-Nya. Ketika membicarakan ras,

---

<sup>45</sup>Abdullah Muhtar, *Menguatnya Politik Identitas Dalam Jurnal Studi Pemerintahan* (Vol.3 No.1 Februari 2012), p., 120

<sup>46</sup> Muhammadiyah Nawawi Al- Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, jilid , p., 549-550

Allah menyampaikannya melalui lisan atau lisan.<sup>47</sup>

Sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat, setiap manusia di muka bumi ini mempunyai sepasang mata, sepasang alis, hidung, kelopak mata, mulut, dan pipi, dan tidak ada satupun yang sama. Namun masing-masing pasti memiliki ciri pembeda, seperti tampilan, bentuk, atau bahasa.

Beberapa perbedaannya terlihat jelas, sementara perbedaan lainnya tidak kentara dan hanya dapat ditemukan melalui pengamatan dekat. Masing-masing wajah mereka unik dalam hal fitur dan penampilan. Tidak ada sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal kecantikan atau keburukan, namun terdapat perbedaan yang jelas antar individu.<sup>48</sup>

Untuk mengetahui latar belakang masing-masing yang beragam. Yang tidak biasa, atau yang sering dianggap asing dan ganjil, dijabarkan dalam Al-Qur'an agar kita bisa saling mengenal dan terhindar dari penolakan, apalagi kebencian. QS. Al-Hujurat : 13. Allah SWT berfirman yang artinya:

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (QS.Al-Hujarat: 13).

Ayat ini mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membaginya menjadi negara, suku, dan warna kulit, bukan untuk saling mengejek, tetapi untuk saling mengenal dan mendukung. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong terhadap silsilah, status, atau kekayaannya, karena Allah menganggap orang yang paling mulia di antara umat manusia adalah orang yang paling berbakti kepada-Nya. Kecenderungan manusia secara konsisten mengasosiasikan martabat dengan negara dan uang. Padahal, di mata Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya.<sup>49</sup>

Jika diambil kesimpulan dari berbagai ayat dan penafsirannya, maka penggunaan tanda pengenal sebagai instrumen politik diperbolehkan selama individu tidak melakukan tindakan yang merugikan satu sama lain, seperti menyikuk, tersandung, atau mengolok-olok orang lain. Mereka juga harus menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan (diskriminasi rasial) dan tidak membedakan kelompok berdasarkan etnis atau ras. Namun jika syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka haram.

## KESIMPULAN

Politik identitas adalah sebuah konsep yang muncul dalam situasi dimana ia menjadi sarana untuk mencapai suatu tujuan, sehingga menjadi trend politik, yang kemudian menjadi tolak ukur suatu tujuan dalam hal keberhasilan.

Meskipun istilah "identitas" tidak secara eksplisit digunakan di dalam Al-Qur'an, namun istilah tersebut banyak disinggung. Bahkan dalam kiasan tersebut, Al-Qur'an

<sup>47</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), p., 1147-1149

<sup>48</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, p., 309

<sup>49</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), p., 1789

mengatur bagaimana memiliki identitas yang baik dan menggunakan identitas dengan benar agar tidak melanggar peraturan ketika melakukannya. sesuai dengan kitab suci yang disebutkan di atas.

Bahkan Al-Qur'an secara khusus berbicara tentang pemimpin, oleh karena itu jelas bahwa Al-Qur'an tidak melarang seseorang menggunakan identitasnya untuk mencapai tujuan (dalam politik). Apakah pemimpin harus laki-laki atau perempuan, Muslim atau bukan, dan dari suku atau tradisi tertentu? Anda dipersilakan memiliki identitas selama sesuai dengan standar yang telah digariskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan sebelumnya, karena tidak ada larangan untuk memilikinya di dalam Al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Assyari, Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212. Dalam Jurnal: An-Nida (Edisi: Desember 2017, Vol. 41 No. 2)
- Al-Burai, Muhammad, Paradikma Politik Identitas Islam, (Bandung: Mizan, 1986),
- Al-Suyuti Jalaluddin, Luba bal-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, terjemah: Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2008)
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Tafsir Ringkas, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015)
- Baqir asy-shadr, Sayid Muhammad, Sistem Politik Islam, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001)
- Buchari Sri Astuti, Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014)
- Fawaid, Jazilul, Bahasa Politik Al-Qur'an, (Depok: Azza Media, 2012).
- Haboddin, Muhtar, Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal, Dalam Jurnal: Jurnal Studi Pemerintahan (Vol.3 No.1 Februari 2012)
- Haramain, A. Malik, Gus Dur Militer dan Poitik. (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. Ke-1.
- Hermawan Trinugraha, Yosafat, Membaca Politik Identitas Anak Muda Minoritas, Dalam Jurnal: Setudi Pemuda (Vol. 2, No. 2, September 2013)
- Hossein, Seyyed, Islam Tradisi, (Bandung: PUSTAKA, 1994),
- Mahmasani, Shubhi, Falsafah Al- Tasyri' Fi- Islam, (Beirut: Dar al- Ilm li -almalayin, 1988)
- Nur Fadillah, Didik Himmawan, & Ahmad Khotibul Umam. (2024). Elections And Development Of Democracy In Indonesia. Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(1), 17-23. <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i1.6>
- Rahmat, Jalaluddin, Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993)
- Rahman Fazlur, Islam dalam Kata Pengantar. (Mizan: 2017)
- Shaltut, Mahmud, Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah, (Kairo: Dar alQalam, 1966) Cet. III,
- Salim, Abdul Muin, Fiqih Siyasa, Konsepsi Kekuasaan Politik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sari, Endang Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta, Dalam Jurnal: Kritik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Vo 2 No.1 Juni 2016)

## Politik Identitas Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

Fathul Mu'in, Suadi Sa'ad, Sholahuddin Al Ayubi, Iffan Ahmad Ghufron

- Sulaiman Schwart, Stephen, Dua Wajah Islam, Moderatisme VS Fundamentalisme Dalam Wacana Global, (t,tp, Blantika, 2007), Cet.1
- Saradi, Wantona, Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal, Dalam Jurnal: Jurnal Sosiologi Pedesaan,
- Saradi, Wantona. Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal, Dalam Jurnal: Jurnal Sosiologi Pedesaan (Vol. 6, No. 1, April 2018),
- Rahman Andi, Modus Sukses Kepemimpinan dalam Politik Islam: Sebuah Pendekatan Sejarah, Dalam Jurnal Mumtaz, (Jakarta: Institut PTIQ,2012),Vol.02, No.2
- Rashid, Abdul, Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka, 2001)
- Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam,(Jakarta: At Tahiriyah, T Tp,). Cet, ke-1 SMR Asep, Pesan Al-Quran tentang Akhlak. Dalam Jurnal: Diya al-Afkar (Vol. 5, No. 2, Desember 2017)
- Tim Penulis, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdikbud, 2008),
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: PT. Perca, 1985). Cet.I,
- Oktarianti Desi, Konsep Pendidikan Aqidah dalam Perspektif Islam. (Jakarta: Gramedia, 2005)
- Qutub, Sayyid, Keadilan Sosial Dalam Islam, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004)